

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan pemilu pada tahun 2020 di kabupaten Seruyan pada masa pandemi masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Beberapa ketentuan terkait aturan kesehatan yang diatur dalam PKPU No. 6 tahun 2020 masih belum terpenuhi, seperti ketentuan mesti memakai masker/*face shield*, menjaga jarak, menghindari kerumunan masih belum terimplementasi sepenuhnya.

2. Kendala

Kendala dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 2020 di kabupaten Seruyan pada masa pandemi dikarenakan beberapa hal dari berbagai unsur terkait sebagai berikut:

a. Penyelenggara

Penyelenggara mendapati kendala berkenaan dengan keadaan alam yang berubah secara drastis di luar perkiraan yakni terjadinya banjir yang melanda kabupaten Seruyan. Selain itu unsur kepatuhan masyarakat sebagai partisipan pemilih untuk mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan juga menjadi kendala, karena masih

sulitnya mengkondisikan masyarakat untuk mematuhi aturan kesehatan yang ada. Pada tingkat penyelenggara lapangan, ketersediaan lahan/wadah yang cukup dan dapat menunjang agar tidak terjadinya kerumunan.

b. Politisi

Kendala yang dihadapi politisi dalam melaksanakan kampanye adalah upaya memperkenalkan calon yang didukungnya kepada masyarakat. pada saat kampanye timses masih kesulitan untuk mengkondisikan massa yang hadir untuk tidak menimbulkan kerumunan maupun menggunakan APD

c. Masyarakat

Kendala yang dihadapi masyarakat adalah masih kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum, sehingga kesulitan mengambil sikap hukum yang pada akhirnya membuat pola perilaku hukum yang negatif dari tujuan yang dikehendaki aturan yang ada.

3. Evaluasi Keseluruhan

Evaluasi secara keseluruhan berkenaan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilukada) tahun 2020 di tengah masa pandemi di kabupaten Seruyan dapat disimpulkan bahwa kegiatan belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan apabila merujuk ke beberapa indikator yang dikemukakan oleh William N Dunn yakni Efektivitas (capaian hasil yang diinginkan), Efisiensi (usaha yang

dilakukan), Kecukupan (pencapaian hasil dalam memecahkan masalah), Perataan (distribusi yang merata), Responsivitas (hasil yang memuaskan kebutuhan, preferensi, nilai kelompok tertentu), Ketepatan (hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai), yang mana hal ini disebabkan selain oleh kendala-kendala yang dihadapi penyelenggara dan pihak terkait, juga dikarenakan masih ada kurang tepatnya implementasi aturan oleh penyelenggara dan masih kurangnya kesadaran hukum dari pihak terkait.

B. Rekomendasi

Untuk meminimalisir hal-hal tersebut yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemilukada di kabupaten Seruyan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pihak Penyelenggara Pemilukada, agar kiranya dapat melakukan sebaran sosialisasi berkenaan dengan kebijakan pilkada terbaru secara lebih merata yang mana bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat maupun kader pemuda sebagai perpanjangan tangan dari penyelenggara. Kemudian penyelenggara juga dapat membuat analisis ancaman untuk hal-hal yang tidak terduga seperti Banjir yang sebelumnya terjadi, sehingga di kemudian hari apabila ada peristiwa serupa telah disiapkan teknis antisipasi yang dapat membantu proses penyelenggaraan agar tetap berlangsung sesuai dengan rencana.

2. Pihak Terkait pemilukada, baik parpol yang kemudian berhimpun menjadi timses agar dapat membuat database pendukung lebih dahulu jauh-jauh hari, agar kiranya jumlah kehadiran di setiap kegiatan dapat dipantau untuk lebih mentertibkan di kemudian hari. Adapun untuk masyarakat agar kiranya dapat lebih aktif dalam upaya-upaya pencarian informasi berkenaan dengan pemilukada ke depannya. Sehingga segala aturan yang berlaku dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikarenakan masyarakat telah mengetahui dan teredukasi.
3. Besar harapan Peneliti agar penelitian ini dapat dilanjutkan secara lebih mendalam dengan kajian keilmuan yang berbeda baik penelitian berupa analisis kebijakan pemilukada ataupun pola perilaku sosial masyarakat berkenaan dengan pemilukada. Terutama penyelenggaraannya yang dilakukan pada masa yang tidak biasa pada umumnya seperti pada saat pandemi Covid-19.